JURNAL KAJIAN MEDIA

e-ISSN: 2579-9436, URL: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/ilkom/index>

Vol. 2 No. 1

Juni 2018

Halaman 12 - 19

Kompetensi Komunikasi Politik Politisi Perempuan Jawa Timur

Yudiana Indriastuti

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
dian.pinkpanther@gmail.com

English Title: Polical Communication Competency of East Java Women Politician

Abstrak - Sebagai politisi, perempuan mempunyai kemampuan untuk berpolitik dengan baik. Beberapa pemimpin daerah yang dipegang perempuan mampu berprestasi baik dalam membangun daerahnya. Beberapa politisi perempuan mampu memiliki peran yang strategis sebagai ketua maupun wakil ketua komisinya meskipun jumlahnya tidak banyak. Hanya saja kegiatan dan sepak terjang mereka tidak pernah terekspos dalam media. Dengan tereksposnya politisi perempuan di media massa konstituen dan masyarakat tahu siapa dan bagaimana mereka sehingga ketika melakukan fungsi-fungsi politik akan lebih mudah dibandingkan ketika mereka tidak dikenal siapapun. Dalam penelitian ini kompetensi komunikasi antar pribadi yang ada pada politisi perempuan terlihat lemah. Politisi perempuan sangat lemah dalam penguasaan pengetahuan tentang politik sehingga proses adaptasinya kurang baik. Faktor kepemimpinan yang saat ini dimiliki oleh para politisi perempuan memberikan kontribusi dalam membangun kompetensi komunikasi politisi perempuan meskipun tidak besar. Kontribusi tersebut semakin nyata ketika politisi perempuan menjadi orang nomor satu di sebuah daerah. Faktor kepemimpinan yang saat ini dimiliki oleh para politisi perempuan memberikan kontribusi dalam membangun kompetensi komunikasi politisi perempuan meskipun tidak besar. Kontribusi tersebut semakin nyata ketika politisi perempuan menjadi orang nomor satu di sebuah daerah

Kata kunci: politisi perempuan, kompetensi komunikasi politik

Abstract- *As politicians, women have the ability to politicize well. Some local leaders held by women are able to perform well in developing the region. Some women politicians are able to have a strategic role as chairman or deputy chairman of the commission although there are not many. It's just that their activities and actions are never exposed in the media. With the exposure of women politicians in constituent media and the public knows who and how they are so when performing political functions will be easier than when they are not known to anyone. In this research, the competence of interpersonal communication in women politicians is weak. Women politicians are very weak in the mastery of knowledge about politics so that the process of adaptation is not good. The leadership factor currently held by women politicians contributes in building the communication competence of women politicians, although not large. The contribution is more evident when women politicians become the number one in an area. The leadership factor currently held by women politicians contributes in building the communication competence of women politicians, although not large. The contribution is more evident when women politicians become the number one in an area*

Keywords: *female politicians, political communication competence*

PENGANTAR

Kompetensi komunikasi pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang yang meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan tertentu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Kaye menjelaskan bahwa individu dikatakan kompeten jika dia mampu memahami diri sendiri dengan baik dan mengembangkan kendali diri, mampu mengkonstruksi, mengatur dan menjelaskan makna melalui interaksinya dengan orang lain. Selain itu dia juga mampu menampilkan kemampuan untuk mengubah system social secara keseluruhan.

Dengan demikian kompetensi menjadi titik tolak pemahaman sejauhmana ketrampilan komunikasi yang mereka pandang menentukan keberhasilan yang juga menurut ukuran mereka sendiri. Ukuran keberhasilan bagi politisi perempuan yang juga pada kasus ini memiliki jabatan sebagai kepala/wakil kepala daerah adalah ketika mereka berhasil berkomunikasi dengan konstituen dan warganya dengan baik. Selain itu juga para politisi perempuan mampu memiliki percaya diri untuk berbicara baik di depan konstituen atau warganya, di lingkungan partai politik pengusungnya maupun di kalangan partai politik yang lain (di luar partai politik pengusungnya).

Politisi perempuan dikatakan berhasil jika dengan percaya diri membuka akses sebesar-besarnya terhadap saluran-saluran komunikasi politik yang ada termasuk media massa. Berupa sering tampil di media massa, melaluberbagai kreativitas kegiatan, aktifmengeluarkan opini dan analisis sertakritikannya terhadap berbagai persoalan yangada, lewat media massa, baik media cetak,radio dan televisi. Ataupun sering menjadipembicara atau narasumber, penceramah dan lain sebagainya. Di tegaskan oleh Surokim, peneliti senior Surabaya Survey Center dalam wawancara

Kalau politisi perempuan ingin mendapat tempat maka konsolidasi kelas menengah itu salah satu jalannya perempuan harus didorong untuk berani mengambil peran kelas menengah progresif seperti menjadi aktivis LSM, wartawan, pengusaha sehingga akses itu terbuka dan diperhitungkan. bisa di lihat berapa perempuan yang bisa mandiri secara ekonomi yang memegang karier potensial sebagai kontrol atas elit. Berapa banyak perempuan tertarik menjadi aktivis LSM, wartawan, pegiat publik, dst yang memungkinkan perempuan menjadi jujukan media atau nara sumber media sebagai kontrol atas dominasi laki dan elit. Jika pun ada jumlahnya minim sehingga peran itu tidak menjadi signifikan...

Selanjutnya berdasarkan konsep kompetensi di atas maka politisi perempuan dikatakan berhasil jika memiliki wawasan yang baik yang mampu menciptakan, menjaga, dan meningkatkan eksistensinya dalam membangun akses politik.

DISKUSI

Dimensi-Dimensi Kompetensi Komunikasi Politik

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti mendapatkan beberapa dimensi dalam kompetensi komunikasi politik. Berikut peneliti akan menguraikan dimensi kompetensi komunikasi politik yaitu:

Kepercayaan Diri

Sebagai perempuan tentu tidak mudah memasuki dunia politik yang pada dasarnya diciptakan oleh laki-laki. Diperlukan kepercayaan diri pada perempuan ketika memutuskan untuk memasuki dunia politik dan menjadi seorang politisi. Pada penelitian ini telah didapatkan bahwa ketika politisi perempuan memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka mudah bagi politisi perempuan menghadapi persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan politik. Apalagi sebagai pemimpin daerah yang merupakan jabatan politik maka sebagian besar persoalan yang dihadapi adalah persoalan politik. Terbukti politisi perempuan yang memiliki kepercayaan diri yang baik mampu berperan secara maksimal sebagai kepala daerah. Hal ini terlihat pada Walikota Surabaya dan Wakil Bupati Jombang serta Wakil Bupati Ponorogo. Sebaliknya politisi perempuan yang kurang memiliki kepercayaan diri maka dapat dikatakan politisi perempuan tersebut memiliki kompetensi komunikasi politik yang rendah. Meskipun para politisi perempuan tersebut sebagai pemimpin yang harusnya menjadi modal bagi para politisi untuk memudahkan mereka menunjukkan eksistensi sebagai politisi yang handal. Selain itu juga sebagai seorang perempuan yang terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah harusnya menjadi modal guna menumbuhkan kepercayaan dirinya sebagai politisi yang siap memasuki panggung politik yang keras dan sarat dengan simbol-simbol patriarkhi.

Faktanya para politisi perempuan kurang percaya diri dalam berkomunikasi di panggung politik baik secara formal maupun non formal maka politisi perempuan memberikan banyak ruang bagi politisi laki-laki untuk tampil dan menunjukkan eksistensi dirinya. Di samping itu politisi perempuan tampak dengan sengaja melakukan pembiaran panggung politik tersebut dikuasai politisi laki-laki yaitu dengan tidak berusaha memberikan perhatian pada masalah-masalah yang memang selama ini menjadi domain politisi laki-laki. Sebagaimana yang sudah terjadi selama ini di mana permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi bisnis, pertahanan militer, hukum dan ketatanegaraan selalu menjadi domain politisi laki-laki. Kurangnya kompetensi komunikasi politisi perempuan bisa dilihat dari sisi ini, di mana politisi perempuan tidak pernah berusaha untuk memasuki permasalahan-permasalahan tersebut.

Fenomena tersebut sejalan dengan asumsi teori Interaksi simbolik yang menyatakan bahwa setiap individu akan mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman yang didapatkannya. Bisa dipahami jika kemudian politisi perempuan ketika memasuki dunia politik yang merupakan dunia laki-laki kemudian memilih *concern* pada isu-isu atau permasalahan yang tidak jauh dari dunia perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, keluarga, dan anak. Mengingat bidang-bidang tersebut sejalan dengan *frame of experience* sebagai seorang perempuan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi perempuan untuk menunjukkan kualitasnya dan eksistensinya untuk bisa diterima di dunia politik.

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan dimensi yang kedua dari kompetensi komunikasi politik. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa politisi perempuan yang memiliki pengetahuan yang baik dalam arti memiliki bekal yang cukup tentang dunia politik maka akan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Pengetahuan tentang politik tersebut bisa didapatkan dari pengalaman para politisi perempuan ketika mulai masuk ke dalam dunia politik. Para informan yang telah “berkarir” di partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menjadi afiliasi dari sebuah partai politik maka ketika menjadi politisi bahkan ketika menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang merupakan jabatan politik terlihat lebih mudah dalam melakukan komunikasi politik baik

dengan konstituen maupun dengan masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat pada wakil Bupati Jombang yang pada awalnya banyak berkecimpung di Fatayat NU. Selain itu juga wakil Bupati Ponorogo yang karir politiknya diawali dari Kosgoro kemudian masuk dan menjadi pengurus Partai Golkar Ponorogo. Demikian juga dengan Wakil Walikota Kediri yang merupakan aktifis Fatayat NU di kota Kediri. Pengalaman dalam berorganisasi itulah yang kemudian memberikan banyak pembelajaran politik bagi para politisi perempuan terutama ketika menerima jabatan politik sebagai wakil kepala daerah.

Adaptasi

Penelitian ini juga mendapatkan bahwa kemampuan para politisi perempuan dalam beradaptasi di dunia politik pada kenyataannya membawa para politisi perempuan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Pengertian adaptasi adalah cara individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dimana mereka tinggal. Adaptasi ini diperlukan oleh setiap individu dalam memasuki sebuah lingkungan baru, karena setiap lingkungan memiliki karakteristik sendiri. Salah satu bentuk adaptasi adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah cara individu beradaptasi dengan lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini berhubungan dengan tindakan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga adaptasi tingkah laku berhubungan dengan kebiasaan makhluk hidup untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya disuatu lingkungan.

Bila dilihat bahwa dunia politik mayoritas dikuasai oleh kaum laki-laki maka diperlukan proses adaptasi yang baik bagi politisi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik. Oleh karena itu diperlukan proses adaptasi tingkah laku bagi perempuan yang terjun ke dalam dunia politik. Politisi perempuan dituntut untuk mampu berinteraksi dalam lingkungan politik guna mendapatkan pengakuan atau legitimasi politik baik dari para politisi laki-laki baik sebagai kolega politik maupun sebagai lawan politik. Demikian juga terhadap para konstituennya.

Hal inilah yang termasuk dalam adaptasi politik. Adaptasi politik yang dimaksud dalam konteks ini adalah ukuran-ukuran yang dipakai para aktor dalam merespons proses politik yang berlangsung. Gulbrandsen (2003) dan ilmuan politik lainnya membagi adaptasi politik dalam dua kelompok: *adaptasi strategis* yang dibangun berdasarkan pendekatan neoliberal dan *adaptasi normatif* yang disokong oleh pendekatan konstruktivis dan kognitif.

Adaptasi strategis berarti bahwa adaptasi para aktor terhadap proses politik yang berlangsung didasarkan kepada perhitungan untung dan rugi. Setiap aktor akan memilih sikap politik tertentu jika dan sepanjang biaya marginal dari pilihan itu lebih rendah (atau minimal sama) dengan keuntungan marginalnya.

Berkebalikan dengan itu, adaptasi normatif adalah sikap politik yang ditunjukkan oleh aktor karena dia memegang norma-norma tertentu tanpa mempedulikan keuntungan atau kerugian materi yang diakibatkan. Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya atau karena ia belajar, menerima, dan menginternalisasi norma dan nilai yang dibawa pihak lain. Pada penelitian ini para politisi perempuan lebih cenderung melakukan adaptasi normative. Hal ini terlihat bagaimana para politisi perempuan mudah berinteraksi secara baik dengan para konstituen maupun masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Selain itu juga para politisi perempuan dapat diterima dan mendapatkan legitimasi politik secara baik dari partai pendukungnya.

Proses adaptasi yang dilakukan oleh para informan dalam penelitian ini lebih "mulus" prosesnya dikarenakan para informan memiliki "jabatan" politis. Mengingat dengan jabatan

politik yang dimiliki para informan tersebut maka mereka memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengendalikan sistem politik yang ada di wilayah tersebut.

Selain jabatan politik yang memudahkan para informan dalam beradaptasi faktor lain yang juga mendukung mudahnya para informan beradaptasi dalam dunia politik tersebut adalah faktor kesamaan karakter. Artinya bahwa para informan pada dasarnya adalah penduduk asli dari wilayah yang dipimpinnya sehingga mereka memiliki kesamaan karakter sosial budaya. Selain itu juga para politisi perempuan tersebut sudah sangat paham dan mengenal karakter masyarakat di mana karakter masyarakat dan karakter budaya akan mempengaruhi karakter system politik di sebuah daerah. Dengan demikian mudah bagi para politisi perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini untuk melakukan adaptasi terhadap system politik yang ada di masing-masing daerah tersebut.

Keberhasilan proses adaptasi yang dilakukan oleh para politisi perempuan dalam penelitian ini memudahkan bagi politisi perempuan untuk melakukan komunikasi politik dengan masyarakat sekitar dan para konstituennya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kompetensi komunikasi politik merupakan kemampuan politisi dalam beradaptasi dalam setiap situasi politik yang dihadapinya serta kemampuan politisi untuk dapat menjalin interaksi positif dengan para kolega politik guna mendapatkan pengakuan dan legitimasi politik.

Empati

Empati adalah melakukan sesuatu kepada orang lain dengan menggunakan cara berpikir dari orang lain tersebut, yang menurut orang lain itu menyenangkan dan yang menurut orang lain itu benar. Menurut Ubaydillah (2005) empati adalah kemampuan kita dalam menyelami perasaan orang lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. Empati adalah kemampuan kita dalam merespon keinginan orang lain yang tak terucap. Melalui empati individu akan mampu mengembangkan yang mendalam mengenai sesuatu permasalahan. Memahami orang lain akan mendorong antar individu saling berbagi. Empati merupakan kunci dari pengembangan *leadership* dalam diri individu.

Bila dalam konsep dimensi kompetensi komunikasi antar pribadi empati menjadi salah satu unsur di dalamnya maka dalam kompetensi komunikasi politik juga diperlukan empati untuk membangun kompetensi komunikasi politik yang positif. Pada penelitian ini telah dijabarkan bahwa semua politisi perempuan yang juga sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada kenyataannya mudah mengambil keputusan dan kebijakan karena adanya empati terhadap masyarakat yang ditemuinya. Perasaan empati tersebut membantu para politisi perempuan untuk dengan mudah membangun kedekatan dan interaksi dengan masyarakat yang ada di daerahnya. Beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan "*concern*" dari para politisi perempuan sebagai pemimpin dapat dengan mudah diselesaikan karena perasaan empati. Terlebih lagi fokus dari para politisi perempuan tidak jauh dari permasalahan-permasalahan kemiskinan, pendidikan, perempuan dan anak-anak yang pada dasarnya banyak mendorong timbulnya perasaan empati. Sebagaimana yang dilakukan bu Risma dan Bu Ida dalam "membebaskan" daerah prostitusi karena empatinya yang besar terhadap masa depan anak-anak yang tinggal di sekitar "daerah hitam" tersebut. Keberhasilan bu Risma dan bu Ida mengambil keputusan yang "berani" dan beresiko menjadi salah satu bukti bahwa politisi perempuan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Pada kenyataannya para politisi perempuan dalam penelitian ini telah menunjukkan kompetensi komunikasi politiknya dengan baik terhadap masyarakat di daerahnya dengan menggunakan empati.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu pemimpin juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi (Veithzal Rivai, 2007: 3)

Kepemimpinan dalam politik berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Kepemimpinan juga menjadi dimensi dari kompetensi komunikasi politik. Sebagai seorang pemimpin tentu memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih banyak. Termasuk juga dalam politik. Artinya para politisi perempuan yang dalam penelitian ini memiliki jabatan politik yaitu sebagai Kepala Daerah atau sebagai Wakil Kepala Daerah maka dipastikan mereka memiliki kekuasaan dan kewenangan lebih.

Oleh karena itu politisi perempuan memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Fakta menunjukkan bahwa suara dari para informan dalam penelitian lebih mudah diengar dan diterima oleh masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena jabatan (politik) yang diembannya.

Dengan demikian politisi perempuan tidak merasa sulit atau mendapatkan kendala yang besar ketika memasuki dunia politik yang keras dan penuh dengan symbol patriarkhi. Artinya dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya maka sangat membantu politisi perempuan untuk mendapatkan pengakuan politik.

KESIMPULAN

Kompetensi komunikasi intrapersonal politisi perempuan dilihat dari dua aspek yaitu aspek kepercayaan diri dan aspek identitas diri. Artinya kemampuan politisi perempuan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan mengelola identitas diri atau jati dirinya sebagai politisi perempuan akan meningkatkan kompetensi komunikasi intrapersonalnya. Pada akhirnya kompetensi intrapersonal ini akan mendorong terbangunnya kompetensi komunikasi sebagai seorang politisi perempuan.

Kompetensi komunikasi interpersonal politisi perempuan dilihat dalam dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek adaptasi. Pada aspek kognitif di sini seorang politisi perempuan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan tentang politik yang selama ini telah dikuasai oleh politisi laki-laki. Selain itu juga sebagai seorang politisi maka politisi perempuan juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang konstituennya dan masyarakat umum. Aspek adaptasi dalam penelitian ini adalah kemampuan politisi perempuan untuk menyesuaikan diri ketika memasuki dunia politik yang sangat patriarkhi dan penuh dengan dominasi laki-laki. Dalam penelitian ini kompetensi komunikasi antar pribadi yang ada pada politisi perempuan terlihat lemah. Politisi perempuan sangat lemah dalam penguasaan pengetahuan tentang politik sehingga proses adaptasinya kurang baik.

Penelitian mengungkapkan bahwa kompetensi komunikasi politisi perempuan tidak hanya dibangun oleh faktor sosiokultural tetapi juga dibangun oleh faktor pengalaman yang dimiliki oleh politisi perempuan.

DAFTAR BACAAN

- Acker, van Elizabeth. 2003. *Media Representations of Women Politicians in Australia and New Zealand: High Expectations, Hostility or Stardom*, Journal of Policy and Society. 2003. Vol. 22. Issue 1. p 116-136
- Adib Muhammad, 2009, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- _____, 2010, *Filsafat Ilmu Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, Pustaka,
- Ardial, 2010, *Komunikasi Politik*, Jakarta, Indeks
- Ardianto Elvinaro, Bambang, 2007, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin Anwar, 2003, *Ilmu komunikasi sebuah pengantar Ringkas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, 2006, *Pencitraan politik*, pustaka Indonesia, Jakarta
- Arriane Lely, 2010, *Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*, Bandung, Widya Padjajaran
- Bligh, C. Michelle, Cassad, J, betina., Schlehofer, M, Michele., Gaffney, m. Amber., *Competent Enough, But Would You Vote for Her? Gender Stereotypes and Media Influences on Perceptions of Women Politicians*, Journal of Applied Social psychology. 2012, 42, 3, pp. 560–597.
- Bungin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Cangara Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta, Rajawali Pers
- Christine Daymon, Immy Halloway, 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communications*, Benteng, Jakarta
- Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. 2005, *The Sage Handbook of Qualitative Research. Third Edition*. Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage Publications.
- Douglas Kellner, 2003, *Teori Sosial Radikal*, Yogyakarta, Syarikat Indonesia
- Griffin, 2003, *A First Look at Communication Theory 5th edition*, New York, McGraw-Hill Company
- Hamidi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang, UMM Press
- _____, 2010, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang, UMM Press
- Kaye Michael, 1994, *Communication Management*, Prentice Hall, Australia
- Kuswarno Engkus, 2009, *Fenomenologi metodologi penelitian Komunikasi*, Bandung, Widya Padjajaran
- Lawrence Neuman, 2000, *Social research Methods Qualitative and Quantitative Approches Fourth Edition*, USA, Library of Congress Catalog.
- Lincoln, Yvonna S and Egon G. Guba, 2000, *Paradigmatic Controversies, Contradiction and Emerging Confluences dalam Handbook of Qualitative Research*, second edition. Sage Publication
- Lindlof, Thomas R & Taylor, Bryan C, 2002 *Qualitative Communication Research Methodes*, Second Edition, Sage Publication
- Little John, 2002, *Theories of Human Communication*, Jakarta, seventh edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont California.
- Lukiati Komala, *Ilmu Komunika Perspektif dan Konteks*, Bandung, Widya Padjajaran
- Mulyana Deddy, 2004, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya

- _____, 2004, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- _____, 2005, *Komunikasi efektif suatu pendekatan lintas budaya*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- _____, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Morissan, 2009, Teori Komunikasi, Bogor, Ghalia Indonesia**
- Monte Palmer. 2001. *Comparative Politics, Political Economy, Political Culture, and Political Interdependence*. United States of America: F.E. Peacock Publisher, Inc.
- McQuail Denis, 1992, *Mass Communication Theory*, Sage Publication
- Nasution Zulkarnaen, 1990, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: Yudhistira
- Nimmo Dan, 2011, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Poerwandari Kristi, 2001, *Pendekatan Kualitatif dalam Psikologi*, Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI
- Ross, K. 2002. 'Women's Place in 'Male' Space: Gender and Effect in Parliamentary Contexts'. *Parliamentary Affairs*, 55: 189-201
- Saefullah Ujang, 2007, *Kapita Selekta Komunikasi Pendekatan Agama dan Budaya*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Severin, tankard Jr, 2009, *Teori Komunikasi Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Masa*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Stryker, Sheldon. 2000 *Self Identity and Social Movements*, Minneapolis, University of Minnesota Press
- Yin, Robert K, 2009, *Studi Kasus Desain & Metode*, Jakarta, Raja Grafindo Persada